

KAJIAN PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROVINSI PAPUA

Lambertus Marianto Renyaan¹, dan A. Koesmargono²

Magister Teknik Sipil Konstruksi Manajemen Konstruksi
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
e-mail: lambertus.mr@gmail.com¹

Abstract: This study aims to realize the application of SMK3 in several regions and companies in Papua Province as well as what schools occur in the implementation of SMK3 itself. This research uses quantitative research using a questionnaire for the application of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in companies in Papua Province with the help of the Microsoft Excel computer program in data processing. The results of data processing show that implementation in several districts in Papua province such as Jayapura City 71% and Nabire Regency 69%, the level of application of SMK3 is good. Meanwhile, for Mimika Regency 91% and Merauke Regency 86% were categorized as satisfactory reporting level. Likewise in several companies in Papua province, the implementation of SMK3 was included in the category of good reporting level. In limited liability companies (PT) is 71% and limited partnership (CV) is 79%. However, there is still some certainty in the application of SMK3 in Papua, among which there are still many workers who think that OSH is not important and that OSH personnel / officers / experts are in companies in Papua province.

Keywords: SMK3, Implementation of SMK3, Obstacles to the Implementation of SMK3

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SMK3 pada beberapa daerah dan perusahaan-perusahaan di Provinsi Papua serta kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan SMK3 itu sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk melihat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Papua dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam pengolahan data. Hasil pengolahan data diketahui bahwa penerapan pada beberapa kabupaten di provinsi Papua seperti Kota Jayapura 71% dan Kabupaten Nabire 69% tingkat penilaian penerapan SMK3 baik. Sedangkan untuk Kabupaten Mimika 91% dan Kabupaten Merauke 86% termasuk kategori tingkat penilaian penerapan Memuaskan. Demikian halnya pada beberapa perusahaan di provinsi Papua, penerapan SMK3 termasuk kategori tingkat penilaian penerapan baik. Pada perseroan terbatas (PT) adalah 71% dan persekutuan komanditer (CV) adalah 79%. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SMK3 di provinsi Papua di antaranya adalah masih banyak pekerja yang menganggap bahwa K3 kurang penting dan kurangnya personil/petugas/ahli K3 dalam perusahaan-perusahaan di provinsi Papua.

Kata Kunci : SMK3, Penerapan SMK3, Kendala Penerapan SMK3

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam dunia konstruksi sedang mengalami perkembangan yang pesat dan bila ditinjau dari segi manajemen dan teknologi konstruksi bangunan yang termasuk dalam kompleksitas “tidak sederhana”. Dengan demikian model pengendaliannya juga sudah dalam taraf manajemen konstruksi. Secara keseluruhan konstruksi bangunan pada umumnya dituntut menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara lengkap dan utuh, dimana prinsip ini akan menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, data mengenai proporsi kecelakaan kerja di Indonesia

untuk sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32%. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan pelaku jasa konstruksi nasional harus menerapkan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Hal itu dilakukan guna mengurangi kecelakaan dan kegagalan di proyek konstruksi.

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia bertumbuh pesat dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kegiatan konstruksi banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Provinsi Papua. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan

kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian Kajian Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Perusahaan-Perusahaan Di Provinsi Papua yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SMK3 pada beberapa perusahaan di Provinsi Papua. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, seluruh praktisi maupun pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasional memahami serta mengimplementasikan SMK3 pada kenyataannya.

METODOLOGI

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sampel berasal dari bahasa Inggris "sample" yang artinya contoh. Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Menurut Akbar dan Usman (2006; 183) ciri utama sampling ini ialah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih. Dalam penelitian ini, kriteria yang di ambil adalah pemahaman tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan, sehingga sampel sumber data yang di anggap sesuai adalah Ahli K3 umum dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan pemilihan lokasi tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis data primer.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:146-147) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan diperoleh melalui survei hasil kuesioner yang disebar kepada ahli K3 umum yang terdapat pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Papua.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2013:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penyebaran kuesioner yang difokuskan kepada ahli K3 umum pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Papua.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa penjelasan mengenai penerapan SMK3 dan kendala penerapannya. Penjabaran penerapan SMK3 pada wilayah papua yang dilakaukan berdasarkan wilayah dan bentuk badan usaha (PT dan CV).

Penerapan SMK3

1. Berdasarkan Wilayah atau Kabupaten

Dari hasil kuesioner yang di sebar, terdapat 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian, sebagai berikut.

a. Kota Jayapura

Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota ini terletak di teluk Jayapura. Luas Kota Jayapura adalah 940 Km² atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Sedangkan untuk letak astronomis, Kota Jayapura terletak pada 1°28'17,26"LS-3°58'082"LS dan 137°34'10,6"BT - 141°0'8'22"BT (Wikipedia.org). Berikut hasil kuesioner dari beberapa responden dari Kota Jayapura.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Penerapan SMK3 pada Kota Jayapura

No	Perusahaan	Ya	Tidak	Total (%)
1	Responden 1	32	32	50%
2	Responden 2	50	14	78%
3	Responden 3	5	59	8%
4	Responden 4	51	13	80%
5	Responden 5	38	26	59%
6	Responden 6	56	8	88%
7	Responden 7	55	9	86%
8	Responden 8	53	11	83%
9	Responden 9	62	2	97%
10	Responden 10	40	24	63%
11	Responden 11	54	10	84%
Total Rata-Rata				71%

b. Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 20.039 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Kabupaten Mimika sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan

Kabupaten Puncak Jaya, sebelah Selatan dengan Laut Arafuru, sebelah Timur dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga, sedangkan sebelah Barat dengan Kabupaten Kaimana (Wikipedia.org). Berikut hasil kuesioner dari beberapa responden dari Kabupaten Mimika

Tabel 2. Hasil Perhitungan Penerapan SMK3 pada Kabupaten Mimika

No	Perusahaan	Ya	Tidak	Total (%)
1	Responden 12	64	0	100%
2	Responden 13	60	4	94%
3	Responden 14	51	13	80%
Total Rata-rata				91%

c. Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di punggung Pulau Irian dengan ibu kota di Kota Nabire. Jumlah penduduk kabupaten Nabire berjumlah

145.101 jiwa. Kabupaten Nabire terdiri atas 15 distrik, 9 kelurahan, dan 72 kampung dengan total luas 12.075,00 km² dan jumlah penduduk sebanyak 145.101 jiwa. Kode Wilayah Kabupaten Nabire adalah 91.04 (Wikipedia.org). Berikut hasil kuesioner dari responden di Kabupaten Nabire

Tabel 3. Hasil Perhitungan Penerapan SMK3 pada Kabupaten Nabire

No	Perusahaan	Ya	Tidak	Total (%)
1	Responden 15	44	20	69%

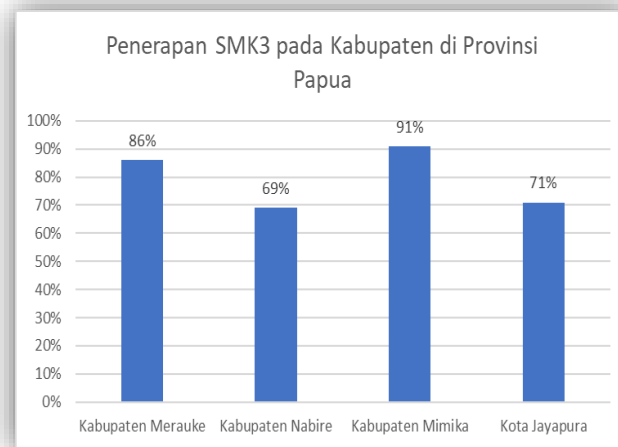
d. Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Merauke. Kabupaten ini adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Kabupaten Merauke terdiri atas 20 distrik, 11

kelurahan, dan 179 kampung dengan luas wilayah 46.791,63 km² dan jumlah penduduk 223.389 jiwa (2017). Kode Wilayah Kabupaten Merauke adalah 91.01(Wikipedia.org). Berikut hasil kuesioner dari responden di Kabupaten Merauke.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Penerapan SMK3 pada Kabupaten Merauke

No	Perusahaan	Ya	Tidak	Total (%)
1	Responden 16	55	9	86%

**Gambar 1.** Penerapan SMK3 di Provinsi Papua

2. Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik

perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas (Wikipedia.org). Berikut hasil rekapitan kuesioner berdasarkan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

Tabel 5. Hasil Perhitungan Penerapan SMK3 pada PT

No	Perusahaan	Ya	Tidak	Total (%)
1	Responden 1	32	32	50%
2	Responden 3	5	59	8%
3	Responden 9	62	2	97%
4	Responden 12	64	0	100%
5	Responden 13	60	4	94%
6	Responden 14	51	13	80%
7	Responden 15	44	20	69%
Total Rata-Rata				71%

b. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer (bahasa Belanda: *Commanditaire vennootschap* (CV), Bahasa Jerman: *Kommanditgesellschaft* (KG)) biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Berdasarkan perkembangannya, bentuk perseroan komanditer adalah sebagai berikut:

1) Persekutuan komanditer murni

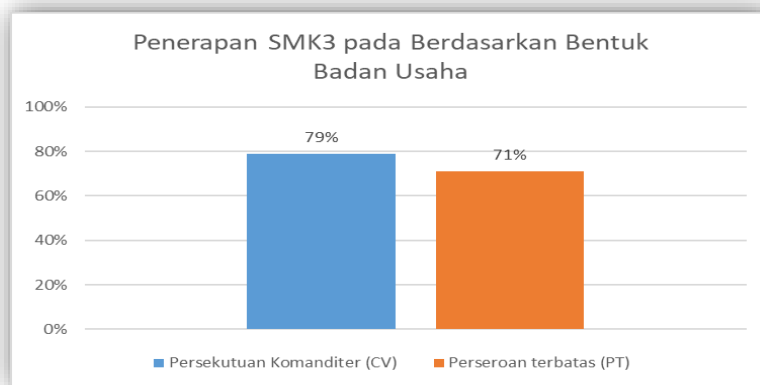
Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer.

2) Persekutuan komanditer campuran
 Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer (Wikipedia.org).

Berikut hasil rekapan kuesioner berdasarkan bentuk badan usaha (CV).

Tabel 6. Hasil Perhitungan Penerapan SMK3 pada CV

No	Perusahaan	Ya	Tidak	Total (%)
1	Responden 2	50	14	78%
2	Responden 4	51	13	80%
3	Responden 5	38	26	59%
4	Responden 6	56	8	88%
5	Responden 7	55	9	86%
6	Responden 8	53	11	83%
7	Responden 10	40	24	63%
8	Responden 11	54	10	84%
9	Responden 16	55	9	86%
Total Rata-rata				79%



Gambar 4. Penerapan SMK3 Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

Dari hasil rekapan kuesioner di dapat rata-rata penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada Perseroan terbatas (PT) adalah 71% dan pada Persekutuan komanditer (CV) adalah 79%. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada Perseroan terbatas (PT) dan Persekutuan komanditer (CV) termasuk kategori tingkat penilaian penerapan baik (lampiran 2 PP No.50 2012).

Kendala/ Permasalahan dalam Penerapan SMK3

Dari hasil kuesioner yang di berikan kepada beberapa penanggung jawab K3 pada perusahaan-perusahaan di provinsi Papua, kendala yang di hadapi di antarannya adalah :

1. Pekerja kadang lupa pemakaian APD saat bekerja ketinggian
2. Kurang kesadaran karyawan pentingnya K3
3. Pemahaman dan Kepedulian karyawan masih kurang
4. Kurang terorganisasi antara petugas K3 dengan para pekerja di lapangan
5. Tidak adanya tenaga ahli khusus yang menangani masalah SMK3
6. Pekerja yang kurang memahami pentingnya SMK3
7. Pekerja harus benar benar di arahkan untuk penggunaan APD
8. Banyak pekerja yang masih merasa K3 tidak terlalu penting
9. Kurangnya tenaga berkompeten
10. Kurangnya personil yang paham tentang SMK3

Tabel 7. Faktor-Faktor Kendala Penerapan SMK3

No.	Pernyataan	Perseroan Terbatas (PT)	Persekutuan komanditer (CV)
1	Kurang kesadaran karyawan pentingnya K3	3	5
2	Kurang terorganisasi antara petugas K3 dengan para pekerja di lapangan	1	-
3	Tidak adanya tenaga ahli khusus yang menangani masalah SMK3	1	2
4	Jumlah kecelakaan kerja (1-5 orang) dalam sebulan	5	3
5	Adanya jaminan kecelakaan kerja	6	9

Dari beberapa permasalahan/ kendala di atas, faktor yang paling banyak di keluhkan adalah banyak pekerja yang masih merasa K3 itu tidak terlalu penting dan masih kurangnya tenaga ahli K3 pada perusahaan-perusahaan di provinsi Papua.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah.

1. Penerapan system manajemen K3 pada Kota Jayapura 71%, Kabupaten Mimika 91%, Kabupaten Nabire 69% dan Kabupaten Merauke 86%.
2. Penerapan system manajemen K3 pada beberapa perusahaan yang bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) adalah 71% dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah 79%.

3. Kendala/permasalahan yang di hadapi adalah banyak pekerja yang merasa K3 tidak terlalu penting dan masih kurangnya tenaga ahli K3 pada perusahaan-perusahaan di provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2018. Di akses dari <https://papua.bps.go.id> pada tanggal 12 Januari 2020.

Silalahi, B. 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Berita PUPR. Kamis, 10 Desember 2015. Penerapan SMK3 di Proyek Konstruksi Kurangi Kecelakaan Kerja. https://www.pu.go.id/berita/view/1_0539/penerapan-smk3-di-proyek-konstruksi-kurangi-kecelakaan-kerja diakses pada 4 Agustus 2018 pukul 23:15.

- Cleland, D. I., & King, W. R. 1987. *Systems Analysis and Project Management*. New York: Mc Graw-Hill.
- Detikfinance. Selasa, 06 Februari 2018. Angka Kecelakaan Kerja RI Meningkatkan ke 123 Ribu Kasus di 2017, <https://finance.detik.com/moneter/d-3853101/angka-kecelakaan-kerja-ri-meningkat-ke-123-ribu-kasus-di-2017>, diakses pada 4 Agustus 2018 pukul 22:21.
- Ervianto, W. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- OHSAS 18002. *Occupational Health and Safety Management Systems- Guidelines for The Implementation of OHSAS 18001. Occupational Health and Safety Assesment Series*. BSI. 2000.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Ridley, J. 2008. *Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Salim, E. 2002. *Green Company*. Jakarta: PT. Astra International.
- Sucofindo. 1998. *Inspeksi Keselamatan Kerja. Bahan Peserta Pelatihan K3*. Jakarta: PT Sucofindo.
- Soeharto, I. 1995. *Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suma'mur. 1996. P.K. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wardani, D. K. 2013. Pengaruh Sikap Pengetahuan Keselamatan Kerja dan Iklim Keselamatan Kerja Terhadap Perilaku Keselamatan Pada Karyawan Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Jurnal dari Fakultas Pendidikan Psikologi Negeri Malang <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel6DE7C57E48CC377E0521A41C845C196C.PDF>, diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 03:10.
- Winarsunu, T. 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Yogyakarta : UMM Press.